











































yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan di analisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan logika induktif.

Logika induktif adalah analisis pada data-data yang bersifat khusus yaitu pada pasal-pasal tentang Tentara Nasional Indonesia TNI sebagai alat pertahanan negara dan konsep Fiqh Siyasah, kemudian dianalisis sehingga ditemukan pemahaman atau titik temunya.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab yang masing-masing babnya terdiri atas sub-sub bab, rangkaian bab ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah Tentara dalam Fiqh Siyasah yang meliputi; pengertian Fiqh *Amir* jihad dalam Fiqh Siyasah, landasan *amir* jihad dalam Fiqh Siyasah, dan konsep Fiqh Siyasah tentang *amir* jihad.





































menyebabkan para pemuda tidak puas. Dan ketidakpuasan itu ditunjukkan oleh para pemuda dengan dibentuknya badan-badan perjuangan seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Hizbullah, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) dan lain-lain yang merupakan organisasi para militer. Kemudian pemerintah membentuk organisasi yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945.

Bahwa Badan Keamanan Rakyat (BKR) ini bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Tetapi BKR ini hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu

Dan garis kordinasi kepengurusan BKR ini, baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah. Maka dari itu kepengurusan BKR ini sama sekali tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Dan juga tidak berada di bawah koordinasi menteri pertahanan. Karena BKR ini hanya disiapkan oleh pemerintah untuk memelihara keamanan setempat, supaya tidak menimbulkan kecurigaan kepada sekutu bahwa negara Indonesia telah menyiapkan diri untuk memulai peperangan dalam menghadapi tentara-tentara sekutu, yaitu Inggris dan Jepang.





komandan itu tetap duduk dalam pimpinan KNI setempat menurut tingkatannya masing-masing.

Pada masa proklamasi kemerdekaan, merupakan masa menentukan dalam pembentukan jati diri TNI, namun sekaligus juga sebagai masa yang cukup sulit dan penuh perjuangan. Karena pada masa itu, TNI tidak lantas menikmati eksistensi organisasinya dengan suka cita, melainkan masuk dalam kancah memperjuangkan proklamasi kemerdekaan. Penjajah Jepang, dan Belanda, yang pada masa itu sangat berhasrat besar menguasai kembali tanah nusantara.

Tentu saja hal ini tidak dibiarkan oleh rakyat Indonesia dan TNI, yang secara bersama-sama melakukan perlawanan dengan kontak senjata. Pertempuran di seluruh wilayah, terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera. Merupakan bentuk-bentuk revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. Kontak senjata yang tidak seimbang, rakyat dan TNI melawan tentara sekutu dan Belanda merupakan peristiwa-peristiwa heroik yang hingga kini dicatat dalam sejarah perjalanan TNI dimasa-masa awal kemerdekaan, perjuangan mempertahankan Indonesia di masa-masa awal inilah yang menjadi tonggak sejarah terpenting eksistensi serta jati diri TNI hingga sekarang. Karena dari sanalah lahir cikal bakal dan doktrin-doktrin TNI yang terpenting. Cikal bakal dan perjalanan organisasi ketentaraan Indonesia di awal kemerdekaan.



barat yang memiliki para pemimpin Indonesia, menambah kuatnya *euphoria*.

Euphoria politik dalam pemerintahan, yaitu dengan di adopsinya model pemerintahan di daerah-daerah barat. Saat itu sedang populer ideologi demokrasi liberal, dengan representasi sistem pemerintahan parlementer. Modal parlementer menjadi mekanisme baku saat itu, untuk mengatur hubungan eksekutif dan legislatif (Parlemen).

Adapun posisi TNI, mengalami upaya *reposisi* dalam kancah politik pada saat itu. Padahal sebelumnya posisi politik TNI sebagai kekuatan penentu, yang memperjuangkan kemerdekaan, cukup diperhitungkan sampai akhir masa revolusi kemerdekaan. Meskipun dalam prakteknya, TNI pada saat itu tidak memaknai peran atau fungsinya di luar kemiliteran. Secara politis, TNI lebih memaknainya sebagai kemanunggalan TNI-rakyat.

TNI baru menyadari pentingnya kekuatan politik, setelah adanya upaya pemerintah dan parlemen saat itu, untuk menempatkan TNI sebagaimana militer di negara-negara barat. TNI diarahkan menjadi militer profesional. Militer yang hanya menjalankan fungsinya pertahanan dan keamanan, tidak punya posisi politik. Atau secara sederhana dalam dikotomi sipil-militer.

TNI sebagai pemegang tampuk pemerintahan. Sejak awal masa pengakuan kedaulatan oleh Belanda, penyatuan komponen-komponen pejuang dan militer, merupakan langkah strategis pertama. APRIS adalah manifestasi penyatuan komponen tersebut.

Namun dalam prakteknya terdapat sejumlah masalah yang cukup mengganjal yang muncul kepermukaan terutama masalah psikologi, primordial, dan politis.

### **3. TNI Setelah Kejatuhan Era Parlementer**

Pertikaian tiada henti antar politisi dan partai-partai politik di panggung pemerintahan Indonesia pada era parlementer, membuat presiden Soekarno mengubah strateginya dengan menggandeng TNI sebagai kekuatan politik. Kemenangan politik Soekarno, melalui pembubaran banyak partai politik dan mengendalikan ketat partai politik, dan memegang kendali pemerintahan secara terpimpin, memberikan angin segar bagi TNI.

Apalagi setelah mengeluarkan dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959, Soekarno dianggap berhasil menguasai dunia politik Indonesia kembali, setelah sebelumnya berjalan dengan tidak stabil. Bersamaan dengan akomodasinya presiden Soekarno pada TNI, dengan menempatkannya sebagai salah satu kekuatan politik golongan yang berkarya dalam militer namun tetap memiliki posisi politik, Partai Komunis Indonesia (PKI)

muncul dari bayang-bayang Soekarno sebagai salah satu partai politik yang memiliki kemajuan pesat saat itu. Sehingga bisa berpengaruh dalam pemerintahan.

Terutama setelah mendapat wadah dari Soekarno lewat pembentukan wadah Nasionalis, Agama, dan Komunis (NASAKOM) setelah dekrit presiden 1959. Perbedaan yang cukup mendasar antara komunis milik PKI dan Pancasila yang dipegang TNI, membuat TNI merasa perlu memperkuat posisi politiknya di tingkat *grassroot*.

Konsep inilah yang kurang disadari oleh Soekarno seperti halnya Soekarno pada saat itu memegang dua kekuatan yang ingin menjadi jalan bagi dirinya tetap berkuasa, namun kekuatan itu berpotensi besar menjadi penghancur baik karir politiknya, Karena perbedaan yang tidak bisa disatukan. Apalagi TNI pintar menutup gerakan membangun dukungan politik ditingkat massa, terutama bersama kekuatan-kekuatan yang anti komunis.

#### **4. TNI di Era Orde Baru**

Kegagalan kudeta gerakan tiga puluh September (G 30 S), selain merupakan klimaks gerakan politik PKI, juga secara tidak langsung berdampak pada karir politik Soekarno. Selama ini PKI yang begitu dekat dengan Soekarno, apalagi setelah gerakan “Nasakomisasi” politik

Indonesia, yang secara kasat mata dilawan oleh *manuver* politik TNI. Ternyata berdampak pada kepercayaan publik terhadap Soekarno.

Pasca G.30 S, *people power* muncul kepermukaan, dengan mahasiswa sebagai motor. Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang dikumandangkan mahasiswa, merupakan cerminan kepedihan rakyat yang selama hampir 10 tahun hidup dalam keterpurukan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan kuatnya rezim ini pun, TNI tidak berdiam diri, tidak membela Soekarno, tetapi tidak juga membela aksi massa berjalan anarkis.

TNI berusaha mencari celah bagaimana agar bisa mengamankan kekuasaan hingga tidak vakum, hingga akhirnya perjuangan mahasiswa mencapai hasil, dengan jatuhnya rezim “secara tidak sengaja”, melalui penyerahan mandat kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pasca supersemar, konstelasi politik berubah kembali. Perubahan ini tentunya menguntungkan posisi TNI. Inilah yang kemudian menjadi awal dari orde baru.

Belajar dari pengalaman atas berbagai peristiwa politik masa orde lama, Soeharto memahami betul bagaimana menempatkan posisi politik. TNI yang pada masa itu sangat mendukung lahirnya kekuatan dari golongan fungsional (Golongan Karya), sebagai penyeimbang atas dominasi politik PKI, maka pada masa orde baru benar-benar menjadi kekuatan politik yang diandalkan oleh Soeharto sebagai presiden.





Namun dapat disimpulkan bahwa motivasi masing-masing perdana menteri itu berbeda. Amir Syaruifuddin menginginkan satu angkatan perang yang dikuasai partai, sedangkan Hatta menghendaki angkatan perang professional yang non-politik dan setia kepada negara melalui pemerintah yang sah.

Dengan demikian sudah pada masa awal angkatan perang kita, nampak adanya tiga pendapat mengenai sifat dan kedudukan yang seyogyanya dimiliki, yaitu :

- a. Konsep *subjective civilian control* atau *Civilianizing the military* adalah angkatan perang itu yang menguasai adalah partai- partai. Dan yang menganut konsep ini adalah Amir Syarifuddin dan kaum sosialis pada umumnya ketika memerintah
- b. Konsep *objective civilian control* atau *militarizing the military* adalah angkatan perang itu professional yang non-politik dan setia kepada negara melalui pemerintah yang sah.
- c. Dan yang ketiga adalah konsepsi yang kemudian dikenal dengan dwi fungsi ABRI.

### C. Tugas Tentara Nasional Indonesia

#### Pasal 6

- 1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
  - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

#### Pasal 7

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Operasi militer untuk perang.
  - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
    1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata
    2. Mengatasi pemberontakan bersenjata
    3. Mengatasi aksi terorisme
    4. Mengamankan wilayah perbatasan
    5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis
    6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
    7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
    8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
    9. Membantu tugas pemerintahan di daerah
    10. Membantu kepolisian negara republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang





bagi penataan dan pengembangan TNI. dalam lingkup nasional yang mempengaruhi TNI adalah perjuangan revolusi, konflik dalam demokrasi liberal, penyimpangan demokrasi terpimpin, *sentralisme* orde baru, dan gelombang demokratisasi era reformasi. sementara secara internasional dinamika TNI dipengaruhi oleh perang dingin (BIPOLAR), dan pasca perang dingin (MULTI POLAR) yang telah melahirkan era internasional baru yaitu perkembangannya demokratisasi dan globalisasi.

Oleh karena itu maka TNI melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang terkait dengan peran fungsinya terutama yang menyangkut peran dan fungsi TNI dalam bidang sosial dan politik. Dimana peran-peran dalam sosial politik yang ketika jaman orde baru “dihalalkan”, maka ketika reformasi berbagai peran itu dipertanyakan dan bahkan dihujat karena dianggap tidak relevan dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh tentara oleh karena itu tekanan kuat muncul untuk melakukan *reposisi* peran dan fungsi dan menguranginya, bahkan membersihkan tentara yang aktif baik dalam sosial maupun politik.

Jati diri TNI merupakan pergulatan dan pergesekan antara kutub yang menghendaki agar TNI menjadi tentara profesional dan menjalankan tugas sebijak-bijaknya (mengakui supremasi sipil dan meninggalkan peran di bidang sosial politik). Kebijakan yang dilaksanakan TNI merupakan hasil politik negara, upaya menterjemahkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam kehidupan

politik Indonesia selalu harus berhadapan dengan kendala militerisme yang terkait erat dengan *otoritarianisme*.

Kondisi ini juga sangat kental terasa di negara kita yang telah mengalami reformasi. Tuntutan perubahan selalu terganjal dengan sikap tidak mau mengikuti kalau bukan dikatakan tidak patuh terhadap kemauan masyarakat sipil yang sudah merasa ditekan oleh kepemimpinan yang bercorak militeristik. Salah satu hal yang dituntut adalah upaya TNI untuk segera meningkatkan profesionalitasnya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pertahanan dan keamanan negara.

Walaupun demikian sebenarnya TNI telah melakukan perubahan, namun profesionalitas yang dikembangkan oleh institusi TNI bukan diarahkan pada profesionalitas yaitu: tingkat keterampilan dan pengetahuan militer yang tinggi, korporasi yang ditandai dengan keterikatan kelompok, solidaritas *korop* yang kuat, serta tanggungjawab yang mendalam terhadap profesi, (*military mind*), pada dasarnya TNI telah melakukan perubahan (*paradigm shift*) dari paradigma lama yang sering berorientasi pada pendekatan keamanan, menuju paradigma baru yang dilandasi cara berpikir analitik dan prospektif berdasarkan pendekatan komprehensif. Perubahan paradigma yang dilakukan belumlah menyangkut dihilangkannya peran sosial politik yang banyak dianggap sebagai penyebab utama dari distorsi peran TNI atau ABRI,





















bentuk lain. Perang memang kelanjutan dari strategi politik. Perang merupakan tindakan terakhir apabila negosiasi tidak berhasil.

Keberadaan tentara tidak bisa lepas dari janin politik dimana tentara itu berada. Dalam artian sebuah negara akan menjadi negara yang kuat dan akan diperhitungkan oleh negara lain harus ditunjang oleh kekuatan tentara yang tangguh, kuat serta mengakui kesetiaan kepada pemerintah, negara dan bangsa.

Pandangan fiqh, tentang keterpautan dalam politik kenegaraan, dalam wacana Islam persoalan krusial yang pertama kali muncul adalah perilaku sejarah Islam adalah persoalan politik. Kemudian keduanya sangat menghargai wawasan kebangsaan.

Tentara sebagai *suprastuktur* negara tentu memiliki wawasan kebangsaan yang *capable*, dimana sebagai garis demarkasi negara seluruh baktinya dihadapkan kepada kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada kata makar pada bangsa dan negara serta pimpinan. Dalam konsepsinya, sebagai sebuah agama yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia, Islam memberikan nilai-nilai etis dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sehingga kehidupan bernegara tidak saja berdimensi duniawi tetapi juga bernuansa religius.







